

KINERJA, KENDALA, DAN STRATEGI PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI

Achieving Cattle Meat Self-Sufficiency: Performance, Constraints, and Strategy

Iskandar Andi Nuhung

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jln. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat 15412
E-mail: andi_nuhung@yahoo.co.id

Naskah diterima: 18 Maret 2015; direvisi: 15 April 2015; disetujui terbit: 5 Juli 2015

ABSTRACT

Indonesia has a big opportunity to realize cattle meat self-sufficiency, and even it is possible to become an exporter such in 1970's. This article reviews the constraint issues in cattle industry and formulates a concept of cattle industry toward meat self-sufficiency. Cattle industry deals with typical culture and characteristics of business, policy and political issues, financial scheme, limited grassing field, breeding, development management, meat market and price, competitiveness, and inter-institutional coordination. All of those problems shift Indonesia from an exporter to an importer. In the future, political will, domestic product orientation, prioritizing small farmers through partnership, integrated farming, franchise system, cattle development project management unit are necessary to boost cattle industry. Other attempts to take by the government are special credit scheme for cattle development, grassing field development, cattle breed supply through breeding farm system development, effective and accountable cattle development management. The government needs to reformulate cattle development road map to accommodate internal and external environment issues, and to emphasize the goals of cattle industry development, such as increasing cattle population, enhancing meat product, improving cattle farmers' income, and sustaining cattle meat self-sufficiency.

Keywords: *performance, constraint, strategy, self-sufficiency, cattle meat*

ABSTRAK

Indonesia berdasarkan potensi sumber daya alam, sumber daya genetik, budaya, teknologi, dan pengalaman sejarah mempunyai potensi yang besar untuk mewujudkan swasembada daging sapi, bahkan dapat kembali menjadi eksportir sapi seperti di tahun 1970-an. Tulisan ini mencoba mengidentifikasi permasalahan dan beberapa konsep pemikiran pemecahan masalah serta implikasi kebijakan untuk mewujudkan swasembada daging sapi. Beberapa masalah yang menjadi *bottleneck* pengembangan ternak sapi seperti sifat dan karakteristik pengembangan sapi, kebijakan yang belum komprehensif, skim pembiayaan yang terbatas, alih fungsi dan terbatasnya lahan penggembalaan, sumber bibit yang terbatas, manajemen dan pola pengembangan yang belum efektif, kepastian harga dan pasar masih lemah, dan koordinasi yang lemah, perlu mendapat perhatian. Indonesia menjadi importir sapi dengan nilai yang cukup besar yaitu mencapai Rp13,5 triliun tahun 2014. Selain kemauan politik, juga diperlukan ketegasan kebijakan yang berpihak pada produk daging sapi dalam negeri dan peternak, pilihan pola pengembangan yang efektif menjawab masalah mendasar yang dihadapi terutama pelibatan peternak sapi, seperti pola Inti Plasma, pola pembangunan peternakan sapi terpadu, pola waralaba (*franchise*), pola Unit Pelaksana dan Pembinaan Peternakan Sapi (UP4S). Diperlukan adanya skim khusus pembiayaan seperti pada skim pengembangan perkebunan pola PIR-BUN. Kepastian lahan pengembangan, sumber bibit yang terjamin ketersediaan jumlah dan kualitasnya, serta manajemen pengelolaan pengembangan yang efektif dan akuntabel sebagai upaya terobosan *debottlenecking* untuk pengembangan ternak sapi nasional. Pemerintah perlu menyusun kembali cetak biru atau peta jalan pengembangan ternak sapi yang didasarkan pada hasil pengkajian yang komprehensif dengan mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis baik domestik, maupun di dunia internasional dalam rangka peningkatan populasi, produksi, pendapatan dan kesejahteraan peternak, serta swasembada berkelanjutan daging sapi.

Kata kunci: *kinerja, kendala, strategi, swasembada, daging sapi*

PENDAHULUAN

Impor sapi telah lama menjadi isu yang mengundang perdebatan berbagai kalangan, karena ditengarai telah menjadi *playing field* bagi mereka yang ingin meraup keuntungan dan manfaat dari proses impor tersebut. Selisih harga daging sapi di negara asal impor dan di pasar domestik berdasarkan beberapa catatan hampir mencapai 100%, sehingga menyebabkan bisnis impor sapi sangat menggairkan. Impor sapi yang terdiri dari sapi hidup (untuk bibit dan bakalan) dan daging nilainya cenderung semakin meningkat. Tahun 2014 nilai impor sapi mencapai US\$1.039 juta atau setara dengan Rp13,5 triliun (kurs Rp13.000 per US\$). Angka tersebut belum termasuk impor jeroan yang volumenya juga cukup besar.

Rouf *et al.* (2014) mengatakan bahwa impor daging sapi relatif lebih besar dibandingkan dengan impor daging jenis lainnya. Hal ini diperkuat dengan data bahwa impor daging sapi menyumbang 21,44% terhadap total nilai impor peternakan sedangkan nilai impor peternakan merupakan 18,29% dari total nilai impor hasil pertanian nasional. Selain mengimpor, Indonesia juga mengekspor ternak dan produk ternak seperti babi, susu, lemak, kulit, dan jangat, serta obat hewan, yang nilainya sekitar 20% dari nilai impor ternak dan produk ternak. Memperhatikan perkembangan tersebut upaya-upaya kebijakan yang bersifat terobosan perlu dipelajari, yaitu bagaimana meredam impor komoditas tertentu dengan memperkuat produksi dalam negeri sebagai substitusi impor dan bagaimana memicu ekspor komoditas-komoditas tertentu seperti obat hewan agar nilai eksportnya meningkat dengan cepat (Pasandaran *et al.*, 2014)

Secara nasional konsumsi daging terutama daging sapi masih sangat rendah, jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Pada tahun 2013 berdasarkan statistik pertanian konsumsi daging rata-rata masyarakat Indonesia hanya 4,69 kg per kapita per tahun. Konsumsi daging terbesar adalah daging ayam ras (broiler) sebesar 3,65 kg/kapita/tahun atau 77,8% dari total konsumsi daging, sedangkan konsumsi daging sapi hanya 0,26 kg/kapita/tahun (Kementan, 2014). Data FAO menunjukkan bahwa konsumsi daging rata-rata dunia tahun 2010 diperkirakan mencapai 37 kg/kapita per tahun, dan di negara

maju mencapai 87 kg/kapita/tahun, di negara berkembang rata-rata 25 kg/kapita/tahun (FAO, 1995). Pada tingkat konsumsi yang masih rendah itupun kebutuhan daging belum bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri. Indonesia telah menjadi importir daging dengan jumlah yang besar sejak awal 1980 sampai saat ini.

Pertanyaan yang relevan saat ini adalah pada tingkat konsumsi daging berapa perkapita per tahun yang menjadi target untuk swasembada? Jika kita lihat fakta di atas, apakah Indonesia akan swasembada pada tingkat konsumsi yang rendah (seperti saat ini), seperti rata-rata dunia atau negara berkembang? Skenario ini harus jelas agar *road map* pengembangan ternak bisa dirumuskan dengan suatu sasaran yang jelas. Jika diharapkan hanya dari daging sapi atau ternak ruminansia saja hampir mustahil mewujudkan swasembada daging pada level konsumsi paling rendah sekalipun, karena dengan level konsumsi seperti saat ini (4,6 kg/kapita pertahun) dengan laju pertumbuhan konsumsi yang rendah saja, pemenuhannya pun harus melalui impor.

Apabila pengembangan peternakan dilakukan dengan program yang bersifat konvensional seperti selama ini, maka dapat dipastikan impor tidak bisa dibendung. Diperlukan adanya keseriusan dan terobosan-terobosan baru dalam membangun industri peternakan nasional, jika Indonesia ingin mencapai swasembada dan mengejar ketertinggalan. Masalah-masalah mendasar yang dihadapi dalam pembangunan peternakan harus dapat ditemukenali dengan baik, untuk memudahkan merumuskan solusinya secara efektif. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam dua dasawarsa terakhir, pemerintah selalu mencanangkan swasembada daging, namun sampai saat ini belum pernah bisa diwujudkan karena dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan, termasuk politik dagang secara global. Indonesia pernah menjadi eksportir sapi dalam jumlah yang signifikan sampai akhir tahun 1970-an, dan setelah itu menjadi importir yang cukup besar dan sepertinya sulit dihentikan. Pertanyaannya adalah apa dan di mana *bottleneck* serta bagaimana melakukan *debottlenecking* agar dapat diwujudkan swasembada daging sapi Indonesia? Berdasarkan telaahan permasalahan tersebut, tulisan ini mencoba menyoroiti beberapa masalah yang dihadapi dalam pembangunan peternakan sapi, serta beberapa gagasan dan konsep pemikiran

pembangunan peternakan sapi nasional guna mewujudkan swasembada daging sapi berkelanjutan.

KINERJA PEMBANGUNAN PETERNAKAN SAPI

Berdasarkan potensi sumber daya alam, sumber daya genetik, teknologi, dan budaya masyarakat Indonesia, maka sesungguhnya Indonesia memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ternak sapi. Namun, karena pengelolaannya belum optimal maka produksi ternak sapi tidak mampu mengejar perkembangan permintaan, baik untuk pasar domestik maupun untuk ekspor. Angka-angka statistik yang tersedia menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi sebesar 3,9% per tahun dan produksi daging sapi Indonesia menunjukkan pertumbuhan rata-rata 5,05% per tahun (2005-2014) seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Populasi dan produksi daging sapi Indonesia, 2005-2014

Tahun	Populasi (ekor)	Produksi daging (ton)
2005	10.569.312	358.704
2006	10.875.125	395.840
2007	11.514.871	339.480
2008	12.256.604	392.511
2009	12.603.160	404.518
2010	13.581.570	436.452
2011	14.824.373	485.333
2012	15.980.800	508.906
2013	12.686.240	504.818
2014	14.703.410	539.965
Rata2	12.959.546	436.652
Pert. (%/th)	3,91	5,05

Sumber: Ditjen Peternakan (2009), Kementan (2014), BPS (2011, 2014), diolah

Tabel 1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan produksi daging sapi lebih cepat dibanding dengan laju pertumbuhan populasi. Jika hal ini berlangsung terus atau tidak ada upaya peningkatan populasi yang signifikan, maka populasi akan terus menurun dan pada suatu saat di masa mendatang populasi sapi akan habis dan Indonesia akan tergantung

pada impor sapi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi. Fenomena ini sudah mulai terasa sejak beberapa dekade terakhir dengan meningkatnya volume dan nilai impor baik dalam bentuk sapi hidup maupun daging sapi

Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya pernah tercatat sebagai eksportir daging sapi. Tahun 1968–1973 rata-rata ekspor daging Indonesia mencapai 20.000 ton per tahun. Lalu apa yang terjadi ketika itu sehingga Indonesia bisa mengekspor daging? Ini sejarah sukses yang perlu dipelajari. Pasti ada faktor-faktor kunci yang harus dicari dan ditemukan sehingga terjadi keberhasilan dalam pengembangan sapi ketika itu. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah, *pertama*, penduduk Indonesia masih setengah dari saat ini (2015), padang penggembalaan sapi masih cukup luas, sehingga secara alami peternakan sapi berkembang dengan sendirinya di semua wilayah, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Lampung, dan daerah lainnya. Daerah-daerah tersebut memasok kebutuhan sapi daerah lain melalui perdagangan antarpulau, selebihnya diekspor ke negara tetangga. *Kedua*, pemotongan sapi selektif dalam pengertian hanya sapi jantan atau betina tidak produktif yang dipotong, sehingga betina produktif populasinya tetap dapat dipertahankan dan tetap dapat berkembang biak dengan baik. Beberapa alasan pemotongan sapi betina produktif (SBP) oleh para jagal, yaitu (i) sapi jantan sebagian besar sudah dijual di luar daerah atau diperdagangkan antar pulau; (ii) harga SBP lebih murah dibanding dengan sapi jantan; (iii) sebagian jagal di daerah lebih memilih sapi kecil dan yang tersedia hanya SBP; dan (iv) belum ada kesadaran dari para pemegang kepentingan perlunya untuk mencegah pemotongan SBP (Puslitbangnak, 2013). *Ketiga*, peternakan sapi selain dikembangkan oleh peternak, juga terdapat perusahaan atau *ranch* yang memelihara sapi sampai ribuan ekor yang memenuhi skala ekonomi, sehingga dapat bersaing di pasar ekspor. Pertanyaan mendasar adalah mengapa para pengusaha *ranch* tersebut bubar? Apakah mereka bubar sendiri, dibubarkan, atau diskenariokan supaya bubar? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu pengkajian komprehensif.

Program pembangunan peternakan sapi tidak banyak menyentuh dan membuat terobosan untuk meningkatkan populasi.

Kegiatan-kegiatan pembangunan peternakan seperti sistem inseminasi buatan (IB) yang dikembangkan selama ini jangkauannya sangat terbatas dan tingkat keberhasilannya pun masih rendah, yaitu kurang dari 50%. Hal ini mengakibatkan laju pertumbuhan pemotongan sapi lebih tinggi dibanding dengan laju pertumbuhan populasi.

Tabel 2. Perkembangan populasi dan pemotongan sapi Indonesia, 2005-2013

Tahun	Populasi (ekor)	Pemotongan	
		Ekor	% Populasi
2005	10.569.312	1.653.770	15,65
2006	10.875.125	1.799.781	16,55
2007	11.514.671	1.885.950	16,36
2008	12.256.604	1.899.107	15,50
2009	12.603.160	2.043.947	16,21
2010	13.561.570	2.068.716	15,25
2011	14.824.373	2.223.661	15,00
2012	15.980.800	2.355.136	14,73
2013	12.686.240	2.645.370	20,85
Rata-rata	12.763.539	2.063.937	16,17
Prtbhn (%/th)	2,22	6,66	

Sumber: Ditjen Peternakan (2009, 2013)

Pemotongan sapi yang dilaporkan merupakan penjumlahan dari sapi impor dan sapi domestik/lokal. Angka-angka pemotongan sapi yang tercatat tahun 2005-2013 mencapai rata-rata 16,17% dari populasi setiap tahun (Ditjen Peternakan, 2009 dan 2013) dan yang dipotong di RPH (Rumah Potong Hewan), rata-rata 8,9% dari populasi (BPS, 2014), berarti masih cukup besar pemotongan sapi dilakukan di luar RPH atau di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) secara tradisional. Seperti diketahui bahwa RPH adalah lembaga resmi untuk pemotongan hewan, sedangkan TPH hanya diizinkan memotong saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, tetapi kenyataannya berperan seperti RPH dan Pemerintah Daerah memperoleh retribusi dari TPH tersebut.

Tabel 2 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pemotongan ternak sapi mencapai 6,66% per tahun, lebih cepat dari laju pertumbuhan populasi yang hanya 2,22% per tahun (2005-2013). Data menunjukkan bahwa impor sapi cenderung semakin meningkat setiap tahun, apalagi menjelang hari-hari raya.

Perkembangan impor sapi dan daging sapi pada periode 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Impor sapi hidup dan daging sapi Indonesia, 2004-2014

Tahun	Sapi hidup		Daging		Total nilai (US\$000)
	Jumlah (ekor)	Nilai (US\$000)	Volume (ton)	Nilai (US\$000)	
2004	240.000	91.281	11.772	27.113	118.394
2005	260.800	109.652	21.484	43.646	153.298
2006	271.900	111.141	25.949	49.077	160.218
2007	414.300	217.735	39.400	92.846	310.581
2008	571.400	380.573	45.708	126.146	506.899
2009	219.182	426.661	67.390	188.661	615.322
2010	207.717	448.098	96.508	289.586	737.684
2011	118.921	321.001	65.022	234.265	555.266
2012	82.197	228.030	39.026	164.120	392.150
2013	130.021	338.399	47.697	222.222	560.621
2014	246.509	681.229	76.858	358.101	1.039.330
Rata2	251.177	304.891	48.801	163.253	468.144
Pert(%/th)	0,2	64,62	55,28	122,07	77,78

Sumber: Ditejen Peternakan (2009), Kementan (2007, 2012, 2014), BPS (2011, 2014), diolah.

Tabel 3 menunjukkan bahwa impor sapi hidup dan daging sapi cenderung fluktuatif dan sejak tahun 2012 cenderung meningkat secara signifikan. Menarik untuk dicermati dari data tersebut bahwa harga sapi hidup mengalami kenaikan dengan sangat tinggi dari rata-rata US\$380 per ekor tahun 2004 menjadi US\$2.763 per ekor tahun 2014 atau naik sebesar 627,10% atau meningkat rata-rata 62,71% per tahun. Sementara itu, harga daging sapi impor meningkat dari US\$2.303 per ton tahun 2004 menjadi US\$4.659 per ton tahun 2014 atau naik sebesar 102,3% atau rata-rata 10,23% per tahun. Nilai impor ternak sapi dan daging sapi meningkat rata-rata 77,78% per tahun. Sementara itu yang perlu mendapat perhatian dan pengkajian adalah bahwa impor daging sapi meningkat dengan cukup signifikan, yaitu volume meningkat rata-rata 55,28% dan nilainya meningkat rata-rata 122,07% per tahun. Saat itu HS code untuk daging sapi termasuk di dalamnya jeroan lebih mendominasi impor "daging" karena preferensi di dalam negeri pada saat jeroan dibatasi hanya jantung dan hati maka harga meningkat. Begitu pula pada saat ketentuan sapi bakalan

yang boleh masuk diubah dari rata-rata 350 kg menjadi maksimal 350 kg sampai di pelabuhan Indonesia, harga beli sapi bakalan menjadi lebih mahal karena kasus diseleksi berdasarkan beratnya.

Sebagian besar impor daging dan sapi didatangkan dari Australia dan Selandia Baru, selain karena pertimbangan bahwa kedua negara itu bebas dari penyakit mulut dan kuku, juga harganya lebih murah dan jaraknya lebih dekat sehingga biaya pengangkutannya lebih rendah. Lagi pula untuk mengisi restoran dan hotel-hotel bertaraf internasional preferensi mereka jatuh pada daging sapi impor yang kualitasnya dinilai lebih baik dan higienisnya terjamin.

PERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN SAPI

Rendahnya kinerja pembangunan peternakan sapi, sehingga tidak mampu memenuhi perkembangan permintaan konsumsi daging, karena dihadapkan pada beberapa persoalan yang menjadi *bottleneck* pengembangannya. Padahal, pemerintah dalam dua dekade terakhir telah mencanangkan swasembada daging, namun belum pernah dapat diwujudkan. Beberapa persoalan yang dihadapi baik bersifat teknis maupun nonteknis (kebijakan, manajemen, koordinasi) telah menghambat dan memperlambat pembangunan peternakan sapi.

Persoalan pertama, masih lemahnya dukungan politik dan kebijakan pembangunan industri ternak sapi. Sementara itu, kebijakan dan program pengembangan ternak sapi yang sudah dibuat tidak didukung oleh sumber daya yang memadai terutama alokasi pembiayaan baik dalam bentuk APBN maupun kredit perbankan. Hal ini disebabkan karena koordinasi regulasi antarinstansi yang lemah. Para peternak memiliki akses yang rendah terhadap perbankan, baik karena ketidaktahuannya maupun karena kebijakan perbankan yang belum sepenuhnya berpihak kepada peternakan rakyat. Ada lima penyebab ketidakberhasilan swasembada daging, yaitu (1) kebijakan program yang dirumuskan tidak disertai dengan rencana operasional yang rinci; (2) program-program yang dibuat bersifat *top down* dan berskala kecil dibanding dengan sasaran yang ingin dicapai; (3) strategi implementasi program disamaratakan dengan tidak memperhatikan wilayah unggulan, tetapi

lebih berorientasi komoditas unggulan; (4) implementasi program-program tidak memungkinkan untuk dilaksanakan evaluasi dampak program; dan (5) program-program tidak secara jelas memberikan dampak kepada pertumbuhan populasi secara nasional (Yusdja, *et al.*, 2004).

Persoalan kedua, manajemen pembangunan peternakan sapi cenderung bersifat alamiah, tanpa terobosan baru, terutama dalam rangka peningkatan populasi yang justru menjadi isu sentral ternak sapi. Hal ini terlihat dalam statistik perkembangan populasi dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah. Pola dan sistem pengembangan ternak sapi masih mencari bentuk, sehingga pada umumnya masih bersifat uji coba, misalnya dengan pola integrasi sapi-sawit, pola kemitraan dan program-program lainnya. Konsep integrasi sawit-sapi yang sudah dikembangkan sejak tahun 2003 belum dimaknai sebagai suatu program nasional yang mengikat semua sektor. Pengendalian plasma nutfah ternak sapi, semakin terkendala apalagi dalam era globalisasi yang tidak mengenal lagi batas geografis menyebabkan sumber genetik sapi lokal telah banyak hijrah ke negara lain. Selain itu kawasan pengembangan tidak terkonsentrasi secara spasial untuk memudahkan pengelolaan, pembinaan, sistem distribusi, dan pemasarannya. Kegiatan pembangunan ternak sapi masih parsial sehingga tidak bisa mengejar dinamika yang berkembang terutama permintaan pasar dalam negeri. Jargon-jargon politik yang dikemas untuk mewujudkan swasembada daging, tidak diikuti dengan program dan kegiatan nyata di lapangan. Program Sarjana Membangun Desa (SMD) yang dalam beberapa daerah telah berhasil merubah pola pikir peternak perlu diperkuat dalam pengembangannya. Strategi pembangunan peternakan sapi, cenderung lebih mengarah kepada upaya defensif terutama dengan pertimbangan kesehatan hewan, sehingga sumber-sumber benih dari negara lain, di luar negara yang selama ini menjadi langganan impor sapi cenderung dibatasi. Misalnya, kegiatan perdagangan sapi hanya dilakukan dengan negara-negara yang bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang rekomendasinya dari OIE (Office International des Epizootics) yang berkedudukan di Paris, sehingga pasokan dari negara lain menjadi tertutup, meskipun di beberapa bagian negara tersebut sebetulnya bebas PMK. Akibatnya, pasar mengarah pada bentuk pasar monopolistis atau oligopolistis yang bisa

mengarah ke kartel. Sebagai anggota OIE Indonesia mengalami adanya zona bebas PMK di sebuah negara yang tidak bebas PMK, namun hal ini belum bisa dilaksanakan karena kesiapan infrastruktur kesehatan hewan di dalam negeri belum memadai.

Persoalan ketiga, tingkat validitas dan reliabilitas data yang lemah. Suatu hal yang seringkali menyulitkan dalam penyusunan perencanaan adalah ketersediaan data yang akurat. Hal ini juga terjadi pada peternakan sapi. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian berdasarkan inventarisasi dan pendataan yang dilakukan oleh tim inventarisasi populasi ternak ternyata berbeda cukup signifikan dengan data hasil Sensus Pertanian 2013 dengan perbedaan untuk populasi ternak sapi sekitar dua juta ekor. Misalnya, Statistik Pertanian hasil inventarisasi menunjukkan populasi sapi tahun 2013 dan 2014 sekitar 15,9 juta dan 16,6 juta ekor, sementara hasil sensus sebanyak 12,7 juta ekor dan 14,7 juta ekor pada tahun yang sama. Angka terakhir tersebut (hasil sensus pertanian, 2013) sama dengan angka populasi versi Kementerian Pertanian tahun 2008, artinya jika angka statistik pertanian itu akurat, maka dari tahun 2008 sampai tahun 2013 tidak ada pertumbuhan populasi sapi nasional. Angka tersebut semakin perlu dicermati jika diperhatikan angka produksi daging (Statistik Peternakan 2009 dan Statistik Pertanian 2014) yang menunjukkan peningkatan rata-rata 5,05% per tahun.

Persoalan keempat, pola pengembangan terutama dalam tiga setengah dasa warsa terakhir yang mengedepankan pengembangan ternak rakyat dan semakin mengurangi peranan peternak besar atau *ranch*. Indonesia sejak 30 tahun terakhir tidak lagi memiliki sistem *ranch* yang memerlukan lahan luas (1 ekor/ha). Peternak besar (*feedlotters*) hanya memiliki kurang dari 2% dari populasi sapi potong nasional dan 98% merupakan peternak tradisional. Dalam ilmu ekonomi seperti diketahui bahwa usaha produksi dengan kuantitas yang lebih kecil cenderung harga pokoknya menjadi tinggi. Harga daging impor lebih murah karena diusahakan dalam skala besar sehingga harga pokok per satuan produk menjadi lebih rendah, akibatnya harga daging domestik tidak dapat bersaing dengan daging impor. Daging impor memiliki kualitas dan higienis yang lebih terjamin karena pengelolaan dan pemotongannya sudah modern. Jadi, sepanjang diusahakan dengan skala usaha

kecil sangat sulit bersaing dengan daging sapi impor. Dalam beberapa dekade terakhir, hampir sudah sulit ditemukan usaha ternak sapi skala besar, padahal sampai dengan akhir tahun 1970-an banyak *ranch* yang dikembangkan oleh investor seperti yang banyak dijumpai di Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Jawa Timur, dan Lampung. Program pembangunan ternak sapi yang dikembangkan oleh pemerintah pada umumnya untuk membangun peternakan rakyat, bahkan bantuan luar negeri untuk peternakan sapi hampir seluruhnya diarahkan untuk membangun peternakan rakyat dan tidak ada yang ditujukan untuk membangun peternakan skala menengah dan besar. Padahal peternak skala menengah inilah yang menjadi penggerak pembangunan peternakan.

Persoalan kelima, sifat dan karakteristik usaha ternak sapi rakyat yang belum komersial. Berdasarkan hasil pengamatan di beberapa sentra peternakan sapi diperoleh gambaran bahwa ternak sapi hampir seluruhnya diusahakan oleh peternak kecil dengan jumlah yang terbatas. Pada umumnya motif pemeliharaan sapi bagi masyarakat tradisional adalah (1) sebagai tenaga kerja dalam bertani, baik untuk mengolah tanah maupun untuk transportasi hasil dan sarana produksi termasuk rumput; (2) sebagai simbol status sosial di dalam masyarakat dan sering dijadikan mahar ketika hajatan perkawinan keluarga; (3) sebagai aset atau tabungan untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu ada keperluan uang yang mendesak untuk keperluan keluarga, misalnya mengawinkan anak, bayar uang sekolah, untuk haji/umroh; (4) sebagai penjaga lingkungan dan keluarga karena ada yang meyakini bahwa sapi dapat memberi signal/tanda-tanda jika ada ancaman atau melihat sesuatu yang ingin mengganggu keluarga, misalnya pencuri bahkan mahluk halus atau orang-orang berniat jahat. Budaya tersebut menggambarkan bahwa sapi yang dipelihara tidak untuk keperluan pasar atau bukan sepenuhnya untuk dijual dipasar. Inilah persoalan yang dihadapi ketika diinventarisasi bahwa sesungguhnya sapi mencukupi, tapi tidak masuk pasar, sehingga pasokan sapi di pasar rendah dan harga menjadi tinggi, terjadi *overestimated* terhadap pasokan. Pada umumnya peternak tidak membawa sapi mereka ke pasar, tapi pembeli/pedagang yang mendatangi peternak untuk membeli sapi. Jadi motivasi untuk masuk ke pasar dari peternak relatif rendah. Sistem budi daya sapi potong tradisional yang tidak “komersial” tersebut yang merepresentasikan

98% populasi sapi potong nasional telah memberikan lapangan kerja dan penghasilan terhadap 5,6 juta rumah tangga. Oleh karena itu, program integrasi sawit-sapi diharapkan dapat meningkatkan populasi sapi potong sehingga dapat mengurangi impor.

Persoalan keenam, pengembangan ternak sapi membutuhkan lahan yang luas, terutama untuk membangun usaha ternak yang ekonomis dengan skala usaha yang besar. Ladang penggembalaan di masa lalu kini sudah sebagian besar beralih fungsi, sehingga lahan rerumputan untuk ternak semakin terbatas. Sementara itu, para peternak masih belum dapat mengakses dengan baik pakan buatan baik dari sudut finansial maupun secara fisik karena belum banyak tersedia secara lokal. Untuk membangun industri peternakan secara terpadu mulai dari industri pembibitan sampai pada industri pengolahan memerlukan lahan yang luas, didukung oleh infrastruktur ekonomi yang memadai. Lahan-lahan luas yang masih dapat dijumpai di luar Jawa, belum dapat digunakan secara efektif karena keterbatasan infrastruktur jalan, transportasi, listrik, air bersih, dan infrastruktur ekonomi lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir dikembangkan integrasi sapi dengan kelapa sawit, dengan memanfaatkan bungkil inti sawit yang merupakan produk samping dari perkebunan kelapa sawit yang memiliki nilai nutrisi dan mengandung protein yang tinggi untuk ternak ruminansia (Puastuti *et al.*, 2014).

Persoalan ketujuh, ketersediaan bibit/bakalan terutama yang bermutu baik atau bibit unggul. Bisnis pembibitan sapi nampaknya tidak menarik bagi investor dengan berbagai pertimbangan. Hal ini disebabkan antara lain karena (1) memiliki risiko yang besar; (2) perputaran modal lambat; (3) tidak tersedia insentif kredit murah; (4) status lahan padang penggembalaan tidak pasti dan masa berlaku HGU yang pendek, yaitu 25-30 tahun saja (Ilham, 2007). Pelaku usaha pembibitan sapi potong sebagian besar dilakukan oleh usaha peternakan rakyat dengan pola induk anak (*cow-calf operation*) dalam skala usaha kecil dan biasanya terintegrasi dengan usaha pertanian lainnya (Winarso *et al.*, 2013). Dengan demikian, kemampuan produksi bibitnya sangat kecil dan keunggulannya tidak terjamin karena sebagian besar memang terjadi secara alamiah. Industri perbibitan memang menjadi *cost center* tetapi bukan tidak mungkin untuk dikembangkan.

Persoalan kedelapan adalah lemahnya koordinasi baik antarinstansi maupun antara daerah dengan pusat, serta antarpemerintah dan dunia usaha. Masalah klasik yang selalu muncul dan berulang misalnya adalah kewenangan dalam proses impor sapi. Dalam Undang-Undang Peternakan yang lama, yaitu UU 64/1964, UU 18/2009 atau UU 41/2014 yang sedang diusulkan untuk *judicial review*, kewenangan itu diberikan kepada Kementerian Pertanian dalam hal ini Ditjen Peternakan. Saat ini kewenangan itu sudah hijrah ke instansi yang berwenang di bidang perdagangan. Dalam kondisi seperti itu seringkali terjadi lemahnya kesepahaman antarinstansi dalam pengelolaan dan proses impor sapi. Jika harga melonjak naik maka hampir tidak ada rumus lain kecuali harus impor. Meskipun dari data BPS dan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa stok sapi potong domestik cukup tersedia, tetapi teriakan pelaku tataniaga dan konsumen harus segera diredam melalui operasi pasar dan melalui impor. Kelembagaan pengelola aktivitas yang terkait dengan produksi, distribusi, dan pemasaran sapi masih cenderung ego sektoral. Sistem pemerintahan birokrasi yang mengedepankan evaluasi kinerja masing-masing instansi, cenderung cari selamat, dan seringkali mengabaikan kepentingan sektor lain. Secara psikologi birokrasi, hampir sulit mengedepankan kepentingan sektor lain ketimbang kepentingan kinerja sektornya sendiri, karena itu adalah tolok ukur yang nanti akan dievaluasi dan dinilai oleh lembaga pengawas dan pemeriksa, dengan segala konsekuensi administrasi dan hukum.

STRATEGI PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI

Dalam rangka akselerasi pengembangan industri peternakan sapi, untuk mewujudkan swasembada daging maka perlu dirumuskan strategi dan kebijakan yang efektif. Strategi pengembangannya harus bertolak dari permasalahan yang ada, potensi sumber daya yang tersedia, serta potensi pasar baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis mulai dari aspek kebijakan dan kemauan politik, aspek kelembagaan, aspek sumber daya lahan, pembiayaan, dan pemasarannya. Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan yang selama ini

menghambat dan memperlambat kinerja pembangunan industri peternakan sapi potong. Strategi dan kebijakan tersebut hanya bisa efektif dan berhasil secara optimal apabila seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dan dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha dan masyarakat secara keseluruhan (Nuhung, 2014). Sebelum dikembangkan upaya-upaya *debottlenecking*, maka yang pertama kali harus dibenahi adalah sistem pendataan. Data populasi ternak sapi, data konsumsi daging sapi, pendekatan perhitungan konsumsi, data impor, data sebaran wilayah sentra produksi, jumlah dan kapasitas RPH, TPH tradisional, sebaran penyakit, dan data-data lainnya untuk kepentingan perencanaan, pengembangan dan pembinaan perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Akurasi data dari waktu ke waktu perlu diperhatikan agar tidak terjadi bias dalam pengambilan kebijakan terutama dalam rangka impor sapi dan daging sapi. Berdasarkan pengamatan, hasil evaluasi, dan beberapa referensi, maka upaya-upaya *debottlenecking* yang perlu dikembangkan adalah (1) kebijakan dan kemauan politik, (2) manajemen dan pola pengembangan, (3) pengembangan usaha perbibitan, (4) penyediaan lahan, (5) pembiayaan, dan (6) sistem pemasaran dan perdagangan.

Kebijakan dan Kemauan Politik.

Hulu dari rendahnya kinerja pengembangan ternak sapi adalah pada aspek kebijakan dan kemauan politik pemerintah. Ternak sapi yang menyumbang lebih dari 20% PDB subsektor peternakan harus didukung oleh kebijakan pengembangan yang tegas dengan segala konsekuensi dan implementasinya. Jika swasembada daging sapi telah menjadi komitmen nasional, telah menjadi kemauan politik (*political will*) pemerintah, maka infrastruktur dan sumber daya pendukungnya harus dipenuhi. Tidak hanya kebijakan di bidang pengembangan produksi, tetapi juga kebijakan dibidang distribusi dan perdagangannya yang mengutamakan dan menguntungkan produk dalam negeri. Kebijakan dan komitmen dari pemerintah yang lemah membuat pengembangan ternak sapi dalam negeri mengalami ketidakpastian yang tinggi, sehingga sulit untuk mewujudkan swasembada.

Kondisi lingkungan eksternal dan internal saat ini tidak memungkinkan Indonesia

dalam waktu singkat dapat melakukan swasembada daging sapi karena (1) perdagangan yang semakin terbuka, tidak mungkin menghambat masuknya produk impor tanpa alasan yang kuat; (2) industri sapi potong yang sudah berjalan masih mengandalkan sapi bakalan dari impor; (3) industri sapi potong yang menggunakan bahan baku lokal selama ini tidak mampu mencukupi permintaan domestik; dan (4) upaya swasembada pangan menyebabkan konsumsi daging sapi domestik menurun (Ilham, 2006).

Diperlukan kebijakan yang komprehensif dari hulu sampai hilir kegiatan pengembangan ternak sapi. Kebijakan di bidang pembibitan, lahan penggembalaan, pakan, harga output, sistem perdagangan baik ekspor-impor maupun antardaerah dan antarpulau, perlindungan dari penyakit ternak, kebijakan dibidang sistem pengembangannya, merupakan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan untuk memberi kepastian berusaha di bidang industri ternak sapi potong. Tidak kurang pentingnya adalah politik anggaran nasional dan fasilitas kredit perbankan dengan suku bunga rendah yang dialokasikan untuk membangun peternakan sapi. Demikian pula kebijakan nilai tukar dan perpajakan yang dapat menjadi insentif ekonomi bagi pelaku usaha. Kebijakan tersebut harus menjadi tekad dan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mengemas program-program pembangunan industri peternakan sapi potong secara berkelanjutan.

Perlindungan terhadap pengembangan sapi lokal unggul perlu dirumuskan dalam bentuk peta jalan yang menjadi pedoman pemerintah dan parlemen serta seluruh *stakeholders* ternak sapi potong. Regulasi dibuat sefleksibel mungkin, insentif fiskal dan moneter untuk mendorong investor melakukan investasi di bidang pengembangan sapi potong, baik di bidang pembibitan (*breeding farm*), di bidang pengembangan budi daya ternak termasuk *ranch*, RPH, di bidang pengembangan industri pakan dan farmasi, industri pengolahan dan perdagangannya. Kebijakan subsidi, insentif, dan fleksibilitas dari pemerintah akan banyak menentukan keberhasilan terobosan pengembangan industri peternakan sapi potong, apalagi jika melibatkan dunia usaha yang memerlukan kepastian usaha, memerlukan iklim usaha yang kondusif,

tidak banyak terganggu oleh isu politik, keamanan, dan ketenagakerjaan.

Manajemen dan Pola Pengembangan

Negara berpenduduk besar seperti Indonesia yang kinerja perekonomiannya masih rendah, pemerintah seringkali dihadapkan pada situasi dilematis, yaitu tuntutan produk dengan daya saing tinggi dan pada saat yang bersamaan proses pembangunan diupayakan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat, karena tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem manajemen pembangunan peternakan yang efektif dan produktif dengan mengakomodasi berbagai kepentingan tersebut sebagai sasaran utama. Cetak biru atau peta jalan pembangunan peternakan sapi yang sudah ada sebaiknya direformulasi dengan mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis baik domestik maupun di dunia internasional yang bergerak dengan sangat cepat, mengakomodasi strategi mengantisipasi persaingan yang semakin ketat, politik ekonomi yang tidak sehat, sistem perdagangan yang tidak adil, dan dominasi negara-negara maju yang seringkali tidak bisa dihindarkan. Di dalam negeri permasalahan yang harus diakomodasi adalah sistem pengembangan ternak sapi yang belum efektif dan belum produktif, pengembangan ternak sapi rakyat, kelangkaan sumber daya lahan dan air, kekurangan bibit, dan kualitas produksi yang rendah. Perencanaan pembangunan harus komprehensif dan tidak parsial dengan berdasar pada sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, teknologi, dan potensi pasar. Perencanaan juga harus mengakomodasi sifat biologis dan karakteristik ternak sapi, budaya peternak, dan persaingan dengan daging sapi impor. Antisipasi dinamika penyakit hewan yang selama ini menjadi masalah serius dalam peternakan sapi seperti penyakit kuku dan mulut (PMK), antraks, dan penyakit lainnya. Antisipasi dan penyesuaian terhadap perubahan iklim yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pengembangan ternak sapi, sumber-sumber pakan, dan air.

Pemilihan model atau pola pengembangan industri ternak sapi harus mampu mengakselerasi peningkatan populasi dan produksi daging sapi serta meningkatkan kesejahteraan peternak. Disamping itu, pola

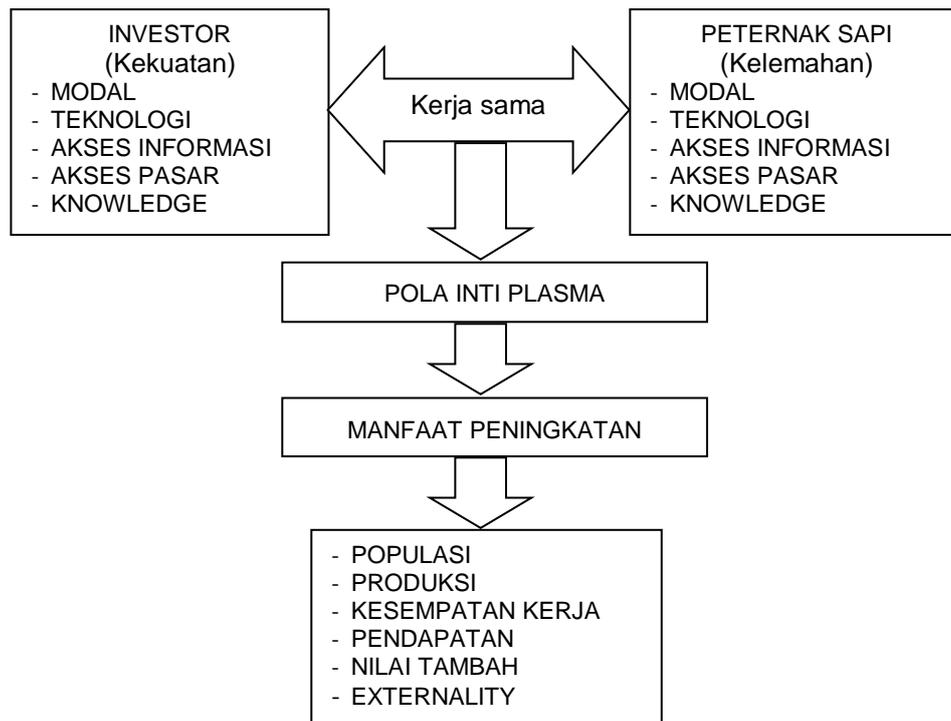
pengembangan yang dikembangkan juga harus mampu meningkatkan daya saing produk daging sapi, melalui peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi dan perbaikan mutu hasil produksi melalui sistem manajemen mutu yang baik. Beberapa pola pengembangan ternak sapi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai berikut:

Pola Inti Plasma

Pola pembangunan inti plasma, merupakan model pembangunan yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan sekaligus diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah mendasar yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia (Nuhung, 2003). Persoalan mendasar yang dihadapi oleh negara berkembang adalah kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan, keadilan, pembangunan pedesaan, urbanisasi, ketimpangan pendapatan, ketimpangan pembangunan antara desa dengan kota, dan antarwilayah. Filosofi pola inti plasma adalah mengintegrasikan usaha kecil/peternak dengan pengusaha besar/investor. Peternak memiliki sumber daya lahan, tenaga kerja, pengalaman beternak sapi potong, dan dapat menyediakan kandang, akan tetapi memiliki keterbatasan permodalan, teknologi, akses pasar, dan akses informasi.

Pengusaha besar yang kesulitan mencari lahan untuk memenuhi skala usaha, kesulitan dalam tenaga kerja, tetapi memiliki kekuatan pada aspek-aspek yang menjadi kelemahan peternak tersebut, seperti permodalan, teknologi, dan akses pasar sehingga jika bekerja sama akan terjadi sinergi yang kuat. Pola ini juga merupakan upaya untuk mendorong dan memotivasi peternak mengembangkan usahanya secara komersial dan berorientasi pasar, sehingga peternak menjadi terbiasa berinteraksi dengan pasar. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian agar pola kerja sama tersebut dapat berkembang sesuai dengan rencana. Pada Gambar 1 disajikan kerangka skema kerja sama inti plasma untuk pembangunan peternakan sapi.

Melalui pola inti plasma, kapasitas produksi menjadi lebih besar sehingga dapat memenuhi skala ekonomi usaha ternak sapi. Dengan terpenuhinya skala ekonomi maka terjadi efisiensi dan optimasi penggunaan sumber daya, sehingga mendorong peningkatan daya saing produk daging sapi.



Gambar 1. Skema peternakan sapi pola inti plasma

Terdapat sosial benefit bagi perusahaan inti dalam bentuk keamanan usaha karena terciptanya rasa memiliki dari peternak plasma terhadap usaha yang dibangun bersama. Tercipta iklim kondusif dalam pengembangan bisnis, sehingga dapat dijamin keberlanjutan usaha dalam jangka panjang karena adanya nilai tambah baik dalam bentuk ekonomi, sosial dan keamanan bagi plasma dan perusahaan inti. Pola ini akan mendorong terjadinya kerja sama yang saling menguntungkan dan juga saling ketergantungan yang merupakan perekat yang kuat dalam usaha peternakan sapi potong. Distribusi manfaat dan risiko merupakan salah satu daya tarik dari pola ini yang biasanya disepakati dalam perjanjian kerja sama.

Pengembangan sapi pola inti plasma akan menjadi suatu usaha skala besar/*corporate* yang akan menciptakan kesempatan kerja baru bagi masyarakat, sesuai dengan jenis pekerjaan dalam bisnis sapi. Kesempatan kerja tersebut dapat berupa tenaga manajerial, petugas lapangan perusahaan, kegiatan pendukung, pemasok sarana produksi dan pakan untuk keperluan bisnis sapi. Dengan demikian, pola pembangunan ini akan mengurangi urbanisasi,

karena tersedianya kesempatan kerja di perdesaan. Perekonomian perdesaan akan berkembang sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang dipicu oleh bisnis sapi pola inti plasma yang memberikan efek ganda terhadap pendapatan, kesempatan kerja, aspek sosial, dan aspek kehidupan lainnya serta dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat dan ketimpangan pembangunan antara desa dengan kota. Pengembangan peternakan sapi pola PIP akan membentuk suatu kawasan agribisnis peternakan sapi yang merupakan model pembangunan wilayah (Muslim, 2006).

Pola Peternakan Sapi Terpadu

Usaha peternakan sapi potong dapat dikelompokkan menjadi usaha pembibitan, usaha budi daya dan usaha penggemukan. Usaha pembibitan dan budi daya merupakan usaha penghasil bakalan, baik untuk dikembangkan maupun untuk bakalan (Puslitbangnak, 2012). Suatu pola pengembangan usaha yang banyak dikembangkan oleh perusahaan multinasional adalah pola peternakan sapi terpadu (*integrated cattle farming system*) yang

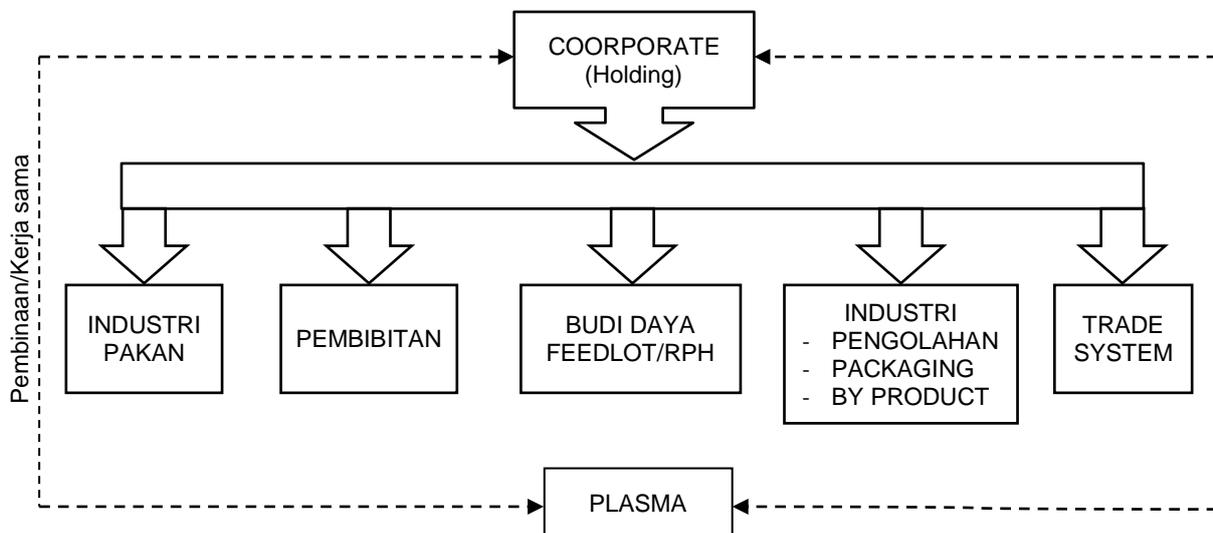
merupakan pengintegrasian seluruh subsistem dalam suatu sistem usaha. Perusahaan peternakan ayam yang menguasai bibit, pakan dan pasar produksi ayam merupakan salah satu contoh yang dapat disaksikan di Indonesia. Pola peternakan sapi terpadu mengintegrasikan semua kegiatan dari hulu sampai hilir dalam suatu sistem bisnis, sehingga aliran barang dan jasa dapat dikendalikan secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan proses yang berjalan. Pola ini juga terbuka untuk diintegrasikan dengan plasma untuk lebih memperbesar kapasitas produksi dan pangsa pasar. Banyak pihak yang menilai bahwa pola seperti ini mengarah kepada bentuk pasar monopolistik, meskipun hal tersebut bisa diperdebatkan. Tetapi bagi dunia usaha bentuk ini sangat efisien sehingga daya saing produk menjadi tinggi. Rantai pasok (*supply chain*) menjadi terkendali, sehingga jika ada kelambatan atau gangguan di suatu subunit usaha akan dengan mudah ditemukan sehingga solusinya juga cepat dapat dilakukan. Pola ini juga membuka peluang untuk selalu melakukan perbaikan dalam proses produksi di setiap subunit usaha dalam rangka memenuhi selera konsumen dan industri. Pola ini memiliki jangkauan pengawasan (*span of control*) yang luas dan beragam, sehingga jika tidak dilakukan pendelegasian tugas dan kewenangan maka sistem manajemen menjadi tidak efektif. Inilah yang merupakan salah satu kelemahan dari sistem seperti ini, apalagi jika unit usaha tersebut terpecah secara geografis. Pola ini juga memerlukan pembiayaan yang besar,

sehingga seringkali menjadi kendala dalam pengembangannya, termasuk kesulitan untuk mendapatkan pinjaman atau kredit dari perbankan.

Pola Franchise

Bisnis model *franchise* telah menjadi tren di seluruh dunia, dan di Indonesia diperkenalkan dan mulai ramai sejak tahun 1970-an dengan munculnya *Kentucky Fried Chicken (KFC)*, *Shakey Piza*, *Burger King*, *Seven Eleven*, *Swensen*, dan lain-lain. Di dunia bisnis pertanian mungkin belum banyak diketahui dan dikembangkan pola *franchise* ini termasuk dalam usaha peternakan. Oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM) pola *franchise* dicoba di Indonesiakan dengan nama "waralaba" (Supardiono, 2014). *Franchise* berasal dari bahasa Perancis *affranchir*, yang berarti *to free* yang artinya membebaskan. British Franchise Association (BFA) mendefinisikan *franchise* sebagai kontrak lisensi yang diberikan oleh suatu pihak yaitu, *franchisor* kepada pihak lain yakni, *franchisee*, dengan perincian sebagai berikut (Supardiono, 2014):

1. mengizinkan *franchisee* untuk menjalankan usaha selama periode *franchise* berlangsung, suatu usaha tertentu yang menjadi milik *franchisor*;
2. *franchisor* berhak untuk menjalankan kontrol yang berlanjut selama periode *franchise*;
3. mengharuskan kepada *franchisor* untuk memberikan bantuan kepada *franchisee* dalam



Gambar 2. Pola peternakan sapi terpadu (*integrated cattle farming system*)

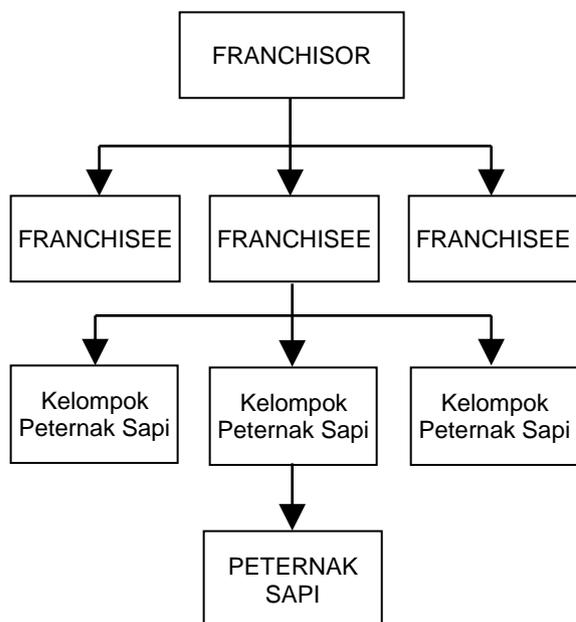
melaksanakan usahanya sesuai dengan subyek *franchisee*nya dalam hal pemberian pelatihan, *merchandising*, atau lainnya;

4. mewajibkan kepada *franchisee* untuk secara periodik selama periode kerja sama *franchise* berlangsung, membayar sejumlah uang sebagai pembayaran atas *franchise* atau produk atau jasa yang diberikan oleh *franchisor* kepada *franchisee*; dan
5. bukan merupakan transaksi antara perusahaan induk (*holding company*) dengan cabangnya atau antara cabang dari perusahaan induk yang sama atau antara individu dengan perusahaan yang dikontrolnya.

Franchisor merupakan pemberi waralaba, yaitu badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Sedangkan *franchisee* adalah penerima waralaba yang merupakan badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Konsep *franchise* dapat diaplikasikan dalam pengembangan ternak sapi dengan melibatkan perusahaan peternakan yang memiliki pengalaman dan reputasi yang baik melalui suatu fasilitasi dari pemerintah. Model ini relatif baru di bidang peternakan dan oleh karena itu perlu pengkajian mendalam yang dilakukan oleh pemerintah. Kelebihan pola ini bahwa pengembangan ternak sapi dapat terdistribusi secara spasial karena para *franchisee* dapat memilih lokasi di setiap sentra produksi ternak sapi, meskipun usaha *franchisor* ada di Jawa misalnya.

Pelibatan kelompok peternak sapi menjadi kekuatan tersendiri untuk mendorong peternakan sapi rakyat, dan dengan melibatkan *franchisee* mendorong usaha menengah dan koperasi. Model ini bisa menjadi andalan untuk mempercepat akselerasi pembangunan industri ternak sapi potong apabila kita lihat perkembangan jenis-jenis usaha *franchise* yang ada, terutama usaha mini market yang mengalami perkembangan luar biasa. Pertanyaan yang relevan adalah apa yang menjadi objek *franchising*? Sesuai dengan karakteristik usaha peternakan, maka yang potensial untuk menjadi objek *franchise* adalah bibit sapi/bakalan, teknologi pakan maupun teknologi budi daya, dan pakan. Sebetulnya

untuk daging sapi praktik *franchise* ini sudah ada yang mengembangkan meskipun masih dalam skala kecil dan terbatas. Perusahaan *franchisor* tidak membutuhkan modal terlalu besar karena *franchisee* akan menyediakan infrastruktur sendiri yang biasanya menjadi jaminan bagi *franchisor*. Infrastruktur tersebut seperti kandang, lahan, tenaga kerja, dan infrastruktur lainnya. Mungkin yang perlu dikaji adalah skala usaha di tingkat *franchisee* dan hubungan antara *franchisee* dengan peternak kecil. Karena model ini merupakan sesuatu yang baru untuk usaha peternakan sapi potong, maka perlu dilakukan pengkajian mendalam oleh pemerintah. Di samping itu, dengan dipelopori oleh pemerintah melalui perusahaan BUMN bisa dilakukan uji coba sebagai pilot proyek. Pada Gambar 3 disajikan skema *franchise* usaha sapi potong.



Gambar 3. Skema *franchise* peternakan sapi

Unit Pelaksana Pengembangan dan Pembinaan Peternakan Sapi (UP4S)

Pola ini diilhami dari pola pengembangan perkebunan dalam kelembagaan UPP (Unit Pelaksana Proyek) di tahun 1980-an, yang melibatkan 100% petani sebagai peserta dan program ini dibiayai APBN. Tentu terdapat perbedaan di dalam mengelola usaha perkebunan dan ternak sapi, akan tetapi prinsip skemanya bisa dikembangkan dan dimodifikasi sesuai dengan

sifat dan karakteristik peternakan. Pola UP4S pada hakekatnya adalah pola pembangunan peternakan melalui pemberdayaan peternak dan mendorong peternak dari peternak tradisional menjadi peternak komersial yang terintegrasi dengan pasar. Pola UP4S dapat menggunakan Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada di daerah sebagai lembaga atau unit pengelolaannya, melalui fasilitasi dan penguatan kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusianya yang dibiayai oleh pemerintah. RPH yang dapat dikembangkan menjadi pengelola tidak memerlukan persyaratan khusus, yang penting bahwa wilayah disekitar RPH dapat dikembangkan peternakan sapi yang memenuhi skala ekonomi. Oleh karena itu, pada tahap awal pengembangan paket dari program tersebut adalah penguatan manajemen RPH sebagai upaya mempersiapkan menjadi pengelola UP4S. Setiap UP4S ditetapkan skala usahanya dan jumlah sapi yang dipelihara oleh peternak yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya dalam wilayah.

Pembinaan oleh RPH dalam bentuk penyediaan bibit unggul, pembinaan pembuatan pakan, teknik budi daya yang baik, pemeliharaan kesehatan hewan, sistem pemasaran ternak, dan fasilitasi untuk akses perbankan. Manajemen UP4S juga berfungsi untuk mengawasi dan memonitor setiap ternak sapi untuk melakukan upaya preventif dan kuratif terhadap penyakit ternak sapi di wilayah kerjanya. Dengan demikian, pola ini juga mengemban misi mempertahankan Indonesia sebagai negara yang berpredikat bebas dari beberapa penyakit ternak sapi, seperti Penyakit Kuku dan Mulut (PMK), sekaligus upaya deteksi dini terhadap jenis penyakit tertentu.

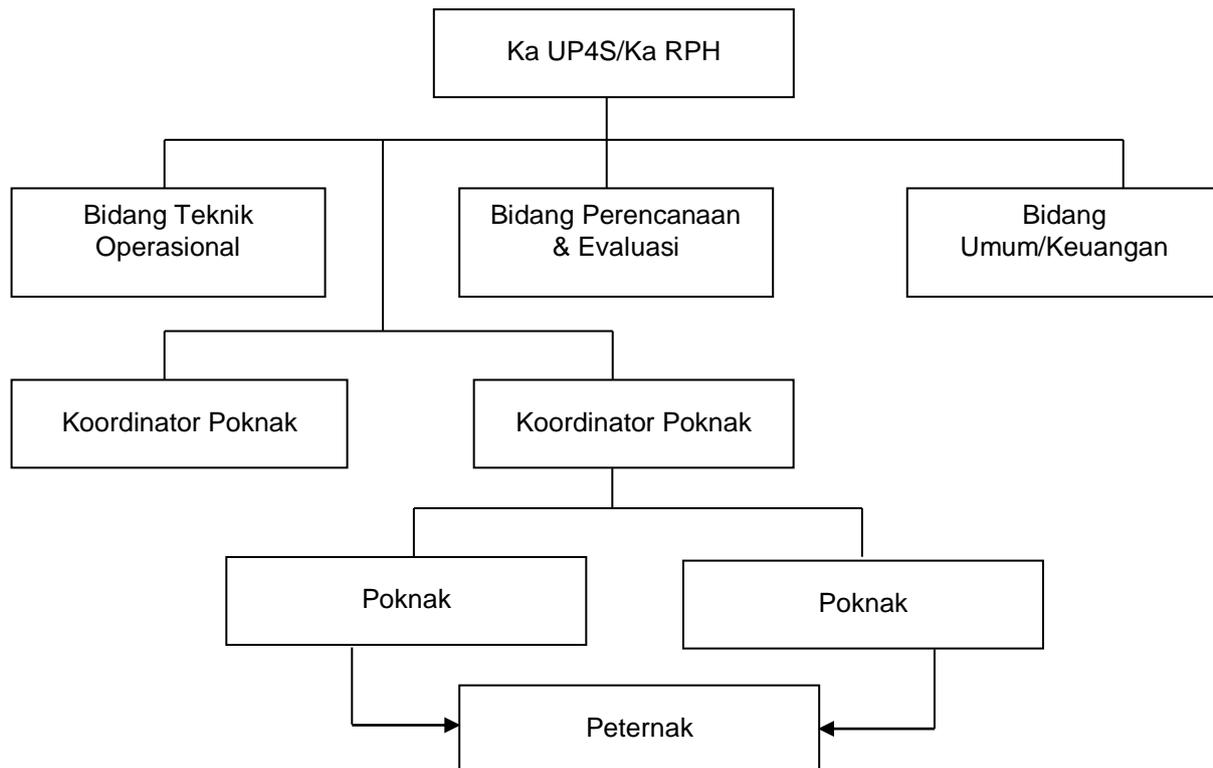
Peternak sapi dibagi dalam kelompok peternak dan dalam jumlah tertentu dibina oleh seorang petugas UP4S, sehingga terjadi transfer teknologi dengan baik. RPH juga berfungsi sebagai pembeli sapi peternak binaannya, dengan suatu sistem dan harga yang disepakati. Dalam pola ini, sapi yang dikembangkan dengan sistem integrasi sawit-sapi atau sapi dengan tanaman lain bisa diintegrasikan dalam pola ini, sehingga kelembagaan pengelolaannya semakin kuat dan pasarnya juga menjadi jelas dan terjamin. Program ini pada tahap awal sebaiknya merupakan program/proyek pemerintah, namun dalam jangka panjang dapat dikerjasamakan dengan swasta. Untuk penentuan skala, perlu dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar tidak

terjadi *over/under capacity* dari RPH. Tetapi seperti diketahui bahwa RPH dapat ditingkatkan kapasitasnya, dapat dimodernisasi sehingga sangat mungkin untuk menjadi pengelola UP4S. Jadi, dalam paket program yang merupakan proyek pemerintah ini terdapat kegiatan penguatan RPH, baik kapasitas, peralatannya, sumber daya manusia, infrastrukturnya, teknologi, kelembagaan dan manajemen, serta panduannya. Dengan demikian, RPH dipersiapkan dengan baik sebagai pengelola program UP4S dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Struktur organisasi dari UP4S ini dapat dilihat pada Gambar 4.

Pengembangan Usaha Pembibitan

Pemerintah bersama dengan dunia usaha perlu merumuskan kebijakan komprehensif untuk pembangunan "*breeding farm*" yang dapat menghasilkan dan menyediakan bibit sapi unggulan termasuk melalui rekayasa genetik atau *embryo transfer*. Penyediaan lahan, pembiayaan, infrastruktur, sumber daya manusia/*technical skill* di bidang *breeding* dan pembibitan. Hanya dengan cara ini dapat dipastikan adanya jaminan sumber bibit dengan kualitas terjamin, dan tersedia setiap saat. Sebaiknya *breeding farm* ini diinisiasi oleh pemerintah melalui BUMN. Untuk efisiensi dan efektivitas distribusi bibit, sebaiknya di setiap sentra pengembangan industri peternakan sapi dibangun minimal satu unit *breeding farm*.

Pemerintah daerah dapat dilibatkan dalam pembangunan usaha pembibitan sapi melalui APBD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk ini semuanya memerlukan pengkajian mendalam agar memiliki tingkat kelayakan sebagai usaha. Untuk mendorong penggunaan bibit unggul maka bibit tersebut disubsidi oleh pemerintah agar harga di tingkat peternak menjadi lebih rendah. Pemerintah sebetulnya telah mengembangkan lembaga-lembaga penelitian untuk menghasilkan bibit unggul, tetapi karena keterbatasan biaya, tenaga, dan sumber daya lainnya, tingkat produksinya juga masih terbatas dan tidak mampu mengikuti permintaan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Balai Pembibitan Ternak Unggul (Sapi) 3 unit, Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak 2 unit, Balai Inseminasi Buatan 2 unit, Balai Embrio Ternak 1 unit, dan Proyek



Gambar 4. Struktur organisasi pola UP4S

Pembibitan Sapi Bali 1 unit (Ilham, 2007). Pemerintah juga pernah melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas sapi lokal seperti di Sumatera Barat dengan memasukkan bibit sapi dari Eropa misalnya Limousin, Simmental, dan Hereford. Tetapi hanya Simmental yang dapat beradaptasi dan berkembang dengan baik pada kondisi di Sumatera Barat, sehingga saat ini sebagian besar populasi sapi di Sumatera Barat merupakan sapi Simmental hasil persilangan (Agung *et al.*, 2014).

Penyediaan Lahan

Peternakan sapi membutuhkan lahan yang cukup luas, apalagi jika mengembangkan pola penggembalaan yang bisa menggunakan rasio 1 ha untuk 1 ekor sapi. Jika menggunakan padang penggembalaan, maka kebutuhan lahan akan semakin luas bisa mencapai 1 : 2,5 atau satu ekor sapi membutuhkan 2,5 ha lahan penggembalaan. Kelangkaan sumber daya lahan terutama di Jawa mendorong peternakan setengah intensif dan intensif (dikandangkan), namun tetap saja memerlukan lahan yang cukup luas. Hal yang perlu mendapat perhatian dan pertimbangan bahwa sistem usaha

peternakan harus jauh dari wilayah pemukiman, baik karena pencemaran maupun bau yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan berat karena sumber daya lahan yang memenuhi persyaratan teknis sudah sulit ditemukan. Oleh karena itu pemerintah harus memastikan ketersediaan lahan bagi pengembangan usaha peternakan sapi, termasuk status lahan yang harus jelas dan memiliki legalitas status hukum. Untuk sistematisnya penentuan lahan usaha, pemerintah daerah melakukan inventarisasi lahan yang potensial untuk pengembangan ternak sapi lengkap dengan peta, kondisi infrastruktur yang tersedia termasuk sumber air. Lahan-lahan yang *clean and clear* tersebut ditawarkan kepada investor dengan suatu mekanisme dan sistem yang menjamin kemudahan untuk melakukan investasi. Sebagai komoditas unggulan pengembangan ternak sapi memerlukan kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu seperti yang dipersyaratkan oleh Bappenas seperti (1) memiliki kontribusi tinggi terhadap ekonomi daerah; (2) memiliki kesesuaian lokasi; (3) memiliki potensi untuk direplikasi dan desiminasi; (4) komplementer dengan kawasan lain; (5) memiliki potensi pasar yang luas dan

kemampuan memenangkan tingkat persaingan; dan (6) memiliki potensi respon dan dukungan dari pelaku dan stakeholders yang memadai (Setiyanto, 2013). Termasuk yang perlu diperhatikan adalah lahan untuk plasma yang mencukupi untuk skala tertentu jumlah ternak sapi yang bisa dikembangkan (kelayakan usaha tani ternak). Melalui pendekatan tersebut maka pengembangan ternak sapi dapat dilakukan secara terdistribusi proporsional untuk menciptakan pemerataan dan keadilan antarwilayah. Hal ini penting menjadi pertimbangan karena sesungguhnya pembangunan juga harus memperhatikan filosofi bangsa, budaya, dan pandangan hidup bangsa yang diimplementasikan dalam sektor pembangunan yang berkarakter kerakyatan dan ke-Indonesiaan (Nuhung, 2015)

Pembiayaan

Investasi di sektor peternakan sapi cukup besar sehingga hampir tidak mungkin anggaran pemerintah melalui APBN dapat membiayai seluruh kegiatan pembangunan peternakan untuk mewujudkan swasembada daging. Anggaran pemerintah dialokasikan untuk kegiatan pembinaan, perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Untuk membangun suatu peternakan sapi dengan pola apapun membutuhkan dana pihak ketiga yaitu perbankan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan kemudahan dan akses yang baik kepada perbankan bagi investor di bidang peternakan sapi, mungkin dengan subsidi bunga dari pemerintah. Hal serupa pernah dilakukan untuk pembangunan perkebunan pola PIR-BUN yang memperoleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan pola Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) dengan bunga 6%, sehingga pemerintah mensubsidi bunga hampir sekitar 100% karena pada saat itu tingkat suku bunga bank komersial sekitar 12%. Melalui pola PBSN tersebut memicu perkembangan perkebunan pola PIR-BUN terutama kelapa sawit tumbuh dengan cukup pesat. Hasilnya sudah dinikmati sekarang dan bahkan pemerintah sudah dapat memperoleh manfaat multiganda dari program tersebut, termasuk penarikan dana kelapa sawit yang diluncurkan pertengahan tahun 2015.

Jika pemerintah serius ingin membangun peternakan sapi, dengan meniru pola PBSN tersebut misalnya skimnya bernama

Pembangunan Peternakan Sapi Nasional (PPSN), maka pengembangan peternakan sapi memiliki sumber pembiayaan yang pasti. PPSN ini mungkin mirip dan sejalan dengan program Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang sudah dicanangkan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tersedianya skim pendanaan akan mendorong investor untuk melakukan investasi apalagi jika pasar ternak sapi tersebut dapat dijamin. Untuk itu perlu pengkajian mendalam terutama dalam menentukan satuan pembiayaannya dan sumber yang tersedia pada perbankan nasional. Koordinasi dan negosiasi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dengan Bank Indonesia sangat diperlukan dan menentukan pengalokasian skim PPSN tersebut. Skim ini bisa dikombinasi dengan skim yang sudah ada, misalnya dengan KUR untuk peternak plasma. Bagi petani (termasuk peternak), sumber-sumber pembiayaan dan kegiatan pemanfaatan dana yang tersedia sangat diperlukan karena pembiayaan pembangunan sektor pertanian akan berdampak pada penguatan kemampuan kelembagaan ekonomi perdesaan untuk memperbaiki pendapatan petani dan masyarakat (Pasaribu dan Sayaka, 2014).

Sistem Pemasaran dan Perdagangan

Muara dari seluruh bisnis baik barang maupun jasa adalah aspek pemasaran terutama harga produk yang rasional dan menguntungkan. Pasar adalah kata kunci apakah investor mau berinvestasi atau tidak. Pembagian margin usaha di antara pelaku usaha harus dapat dipastikan untuk menjamin keberlanjutan usaha. Pemerintah dalam tugas dan fungsinya harus dapat menjaga stabilitas harga daging sapi, yang sebetulnya cukup rumit karena dihadapkan pada dua pihak yang berseberangan secara ekonomi dalam penentuan harga. Produsen tentu menginginkan harga yang tertinggi, sedangkan konsumen mengharapkan harga yang terendah, sehingga mediasi pemerintah sangat menentukan pertemuan di antara kedua kepentingan tersebut. Di sektor pertanian pada umumnya seringkali pemerintah bias dan cenderung lebih memperhatikan kepentingan konsumen dengan dalih bahwa petani atau peternak juga sebagai konsumen. Harga hasil pertanian menjadi fluktuatif dan bahkan sering terjadi ketika panen, harga produk pertanian jatuh pada tingkat yang sangat rendah, sehingga menimbulkan disinsentif bagi

masyarakat petani untuk berproduksi. Pemerintah harus menjamin pemasaran produk ternak sapi baik untuk pasar dalam negeri maupun untuk ekspor.

Banyak negara yang menggunakan kebijakan restriktif untuk melindungi produk dan ekonomi dalam negerinya. Organisasi Perdagangan Dunia menemukan 407 kebijakan restriktif dari negara anggota tahun 2013 naik secara mencolok dari 308 kebijakan pada tahun 2012 (Harian Kompas, 2014 *dalam* Hutabarat, 2014). Pemerintah Indonesia melalui pengkajian yang matang juga harus mencari celah untuk melindungi produksi daging sapi dalam negeri. Jaminan harga yang wajar dan tetap menjanjikan pembagian margin yang proporsional sehingga mampu bersaing dengan margin usaha pada pilihan penggunaan sumber daya yang sama atau biaya imbalan (*opportunity cost*) yang tersedia. Kalau ini tidak terjadi sangat mungkin pengusaha akan mengonversi usahanya ke bisnis yang lain yang lebih prospektif dan menguntungkan. Hal yang perlu mendapat perhatian dan pengawasan bahwa pada pola pembangunan yang melibatkan petani/peternak harus dapat dijamin bahwa masyarakat plasma semakin meningkat pendapatan dan kesejahteraannya. Kasus-kasus yang menyebabkan petani/ masyarakat semakin miskin yang terjadi pada program tertentu harus dihindari dalam program pengembangan ternak sapi. Semua pemangku kepentingan dalam program ini menikmati margin secara adil meskipun tidak harus sama karena margin yang dinikmati harus memperhitungkan korbanan yang diberikan dalam proses produksi.

Pemanfaatan seluruh produk dan produk samping ternak sapi akan mendorong terciptanya usaha yang memiliki misi nirlimbah. Melalui pendekatan tersebut, bisa diprediksi bahwa bisnis ternak sapi menjanjikan keuntungan yang cukup besar, dan berarti tingkat kesejahteraan peternak plasma dapat ditingkatkan. Beberapa hasil samping dari ternak sapi misalnya, kulit, tulang, kotoran, dan air kencing jika diproses lebih lanjut akan memberikan nilai tambah bagi peternak. Kotoran dan air kencing yang bisa diproses menjadi biomassa dan pupuk, sementara tulang-tulang bisa diproses menjadi tepung tulang yang dapat digunakan sebagai campuran pakan. Semua itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Untuk menjamin pasar dan harga maka kehadiran Badan Urusan Logistik yang menangani hasil ternak menjadi strategis dan sangat diperlukan. Sangat terbuka peluang Indonesia akan kembali mencapai kejayaan di bidang industri peternakan sapi seperti di era tahun 1970-an sebagai eksportir yang kuat. Perlu upaya untuk mendorong konsumen kelas atas terutama hotel, restoran internasional, maskapai penerbangan dan kapal laut, serta perusahaan-perusahaan asing dan domestik untuk mengonsumsi daging produk dalam negeri. Untuk itu, sistem kendali dan jaminan mutu produk melalui sertifikasi juga harus dikembangkan secara terencana dan efektif termasuk sertifikat halal.

Persaingan dengan daging impor harus dimenangkan oleh daging sapi produk dalam negeri, baik melalui penguatan daya saing maupun mekanisme fiskal melalui tarif dan pemanfaatan instrumen lain yang dimungkinkan oleh skema WTO, misalnya dengan menggunakan *Sanitary and Phytosanitary (SPS)* dan *safeguard instrument*. Dapat juga dengan menggunakan *technical barrier* di pelabuhan impor atau instrumen kehalalan. Dalam kasus yang lebih spesifik misalnya Indonesia harus menunda pembebasan bea masuk impor produk pertanian dari Australia karena produk substitusi impornya diusahakan oleh jutaan petani, yaitu peternak sapi perah dan sapi potong. Untuk produk sapi pedaging/potong, penundaan tersebut lebih sesuai untuk daging dan jeroan, tetapi tidak sesuai untuk sapi bakalan (bibit). Penurunan impor sapi bakalan akan menguras populasi sapi lokal yang jumlah kelahirannya lebih rendah dari pada jumlah pemotongan (Nuryanti, 2010). Harga daging sapi impor lebih murah dibandingkan dengan harga daging lokal, sehingga kemungkinan terdapat daging sapi impor oleh hotel-hotel khusus dengan kualitas prima dan harga yang lebih tinggi (Widiati, 2014).

PENUTUP

Potensi sumber daya alam, budaya, dan pengalaman sejarah pengembangan sapi Indonesia, mengandung optimisme jika suatu saat Indonesia mampu untuk mewujudkan swasembada daging sapi berkelanjutan, bahkan sangat berpeluang untuk kembali berstatus sebagai eksportir sapi di kawasan Asia Tenggara dan negara lainnya. Langkah-

langkah yang perlu dikembangkan adalah dukungan politik yang kuat dalam bentuk regulasi yang memberi ruang gerak pembangunan industri peternakan sapi nasional. Kebijakan yang tegas dan berpihak kepada peternakan sapi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. Tersedianya lahan pengembangan yang dialokasikan oleh pemerintah khusus untuk pengembangan peternakan sapi nasional. Pembangunan *breeding farm* untuk menjadi sumber bibit sapi unggul yang pada tahap awal diinisiasi dan dibiayai oleh pemerintah melalui APBN. Pemasaran dan harga produk yang terjamin melalui pengaturan dari pemerintah. Tersedianya sumber pembiayaan yang jelas, misalnya alokasi khusus APBN untuk pengembangan UP4S, dan pola inti plasma. Tersedianya spesial skema pembiayaan perbankan untuk pembangunan peternakan sapi dengan tingkat suku bunga yang rendah. Paradigma baru manajemen pembangunan industri peternakan sapi dengan melibatkan dunia usaha sebagai investor membangun peternakan skala besar, tidak hanya beroperasi pada kegiatan perdagangan/impornya. Selanjutnya, perlu dibuat *pilot project* pola-pola pengembangan yang telah diuraikan yang didahului dengan kajian yang mendalam. Masalah harga dan pasar yang seringkali menjadi *bottleneck* semua komoditas pertanian, dapat diatasi dengan memasukkan komoditas daging sapi sebagai bagian dari tugas dan fungsi Bulog.

Indonesia harus mampu mewujudkan swasembada daging sapi dan sedapat mungkin menghindari ketergantungan dari impor sebagai suatu bentuk ketegasan menuju kedaulatan pangan nasional. Cetak biru ataupun peta jalan swasembada daging sapi yang sudah ada perlu dievaluasi dengan mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis baik domestik maupun eksternal yang dinamis. Pengkajian komprehensif terhadap kebijakan, pola pengembangan, dan aspek teknis, sosial ekonomi, dan lingkungan pengembangan ternak sapi yang bersifat terobosan harus dilakukan dengan melibatkan dunia akademik dan lembaga penelitian terakreditasi. Pemerintah diharapkan mampu membangun koordinasi yang efektif baik antara Kementerian, Direktorat Jenderal Tehnis, Dinas Peternakan, dan antarpelaku usaha agribisnis sapi potong. Koordinasi yang efektif antar *stakeholders* dan antarpelaku usaha diharapkan dapat mendorong terjadinya

keterpaduan proses produksi dan antarpelaku usaha agribisnis daging sapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, P.P., M. Ridwan, Handrie, Indriawati, F. Saputra, Suprpto, dan Erinaldi. 2014. Profil morfologi dan pendugaan jarak genetik sapi simmental hasil persilangan. *Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner* 19(2): 112-122.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. *Statistik Indonesia 2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. *Statistik Indonesia 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Ditjen Peternakan. 2009. *Statistik Peternakan 2009*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan.
- Ditjen Peternakan. 2013. *Statistik Peternakan 2013*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan.
- [FAO] Food and Agriculture Organization. 1995. *World Agriculture: towards 2010. An FAO Study*. New York: FAO and John Wiley & Sons.
- Hutabarat, B.F. 2014. Peningkatan Kinerja Pembangunan Pertanian Indonesia Tidak Semata-Mata Bertumpu pada Daya Saing. *Hlm. 7-47*. Dalam: Haryono, E. Pasandaran, M. Rachmat, S. Mardianto, Sumedi, H.P. Saliem, dan A. Hendriadi (eds.). *Memperkuat Daya Saing Produk Pertanian*. Jakarta: IAARD Press.
- Ilham, N. 2006. Analisis sosial ekonomi dan strategi pencapaian swasembada daging 2010. *Analisis Kebijakan Pertanian* 4(2):131-145
- Ilham, N. 2007. Alternatif kebijakan peningkatan pertumbuhan PDB subsektor peternakan di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian* 5(4):335-357
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2007. *Statistik Pertanian 2007*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2008. *Statistik Pertanian 2008*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2012. *Statistik Pertanian 2012*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2014. *Statistik Pertanian 2014*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Muslim, C. 2006. Pengembangan sistem integrasi padi-ternak dalam upaya pencapaian swasembada daging di Indonesia, suatu

- tinjauan evaluasi. Analisis Kebijakan Pertanian 4(3):226-239.
- Nuhung, I.A. 2015. Agribisnis Berkarakter ke Indonesiaan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Nuhung, I.A. 2003. Perusahaan Inti Rakyat dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Penerbit Yasrip.
- Nuhung, I.A. 2014. Strategi dan Kebijakan Pertanian, dalam Perspektif Daya Saing. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Nuhung, I.A. 2014. Revitalisasi Pertanian Terbelenggu. hlm. 283-301. Dalam: Haryono, E. Pasandaran, M. Rachmat, S. Mardianto, Sumedi, H.P. Saliem, dan A. Hendriadi (eds.). Reformasi Kebijakan Menuju Transformasi Pembangunan Pertanian. Jakarta: IAARD Press.
- Nuryanti, S. 2010. Peluang dan ancaman perdagangan produk pertanian dan kebijakan untuk mengatasinya, studi kasus Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru. Analisis Kebijakan Pertanian, 8(3):221-240.
- Pasandaran, E., Haryono, dan Suherman. 2014. Memperkuat daya saing komoditas pertanian. Perspektif Daya Saing Wilayah. Dalam: hlm. 481-506. Dalam: Haryono, E. Pasandaran, K. Suradisastra, M. Ariani, N. Sutrisno, S. Prabawati, M.P. Yufdy, dan A. Hendriadi (eds.). Memperkuat Daya Saing Produk Pertanian. Jakarta: IAARD Press.
- Pasaribu, S.M. dan B. Sayaka. 2014. Reformasi pembiayaan sektor pertanian untuk memperkuat kelembagaan ekonomi perdesaan. Dalam: Haryono, E. Pasandaran, M. Rachmat, S. Mardianto, Sumedi, H.P. Saliem, dan A. Hendriadi (eds.). Reformasi Kebijakan Menuju Transformasi Pembangunan Pertanian. Jakarta: IAARD Press.
- Puastuti W., D. Yulistiani, dan I.W.R. Susana. 2014. Evaluasi nilai nutrisi bungkil inti sawit yang difermentasi dengan kapang sebagai sumber protein ruminansia. Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 19(2):143-151.
- [Puslitbangnak] Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. 2012. Budidaya Sapi Potong Berbasis Ekosistem Perkebunan Kelapa Sawit. Jakarta: IAARD Press.
- [Puslitbangnak] Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2013. Pengembangan Investasi Sapi Potong di dalam Negeri. Jakarta: IAARD Press.
- Rouf, A.A., A. Daryanto, dan A. Fariyanti. 2014. Daya saing usaha sapi potong di Indonesia: pendekatan *domestic resources cost*. Buletin Ilmu PKH Indonesia 24(2):97-107.
- Setiyanto, A. 2013. Pendekatan dan implementasi pengembangan kawasan komoditas unggulan pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi 31(2):171-195.
- Soedjana, T.D. 2013. Partisipasi konsumsi sebagai alat ukur status ketahanan pangan daging. Wartazoa 23(4):166-175.
- Supardiono, D. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Franchise dalam Meningkatkan Kinerja Franchisee. Tesis Magister Agribisnis. Jakarta: FST-UIN yarif Hidayatullah.
- Tangendjaja, B. 2014. Daya saing produk peternakan: ceruk pasar. Dalam: Haryono, E. Pasandaran, K. Suradisastra, M. Ariani, N. Sutrisno, S. Prabawati, M.P. Yufdy, dan A. Hendriadi (eds.). Memperkuat Daya Saing Produk Pertanian. Jakarta: IAARD Press, Badan Litbang Pertanian.
- Widiati, R. 2014. Membangun industri peternakan sapi potong rakyat dalam mendukung kecukupan daging sapi. Wartazoa. 24(4): 191-200.
- Winarso, B. dan E. Basuno. 2013. Pengembangan pola integrasi tanaman-ternak merupakan bagian upaya mendukung usaha pembibitan sapi potong dalam negeri. Forum Penelitian Agro Ekonomi 31(2):151-169.
- Yusdja, Y., R. Sayuti, B. Winarso, I. Sadikin, dan C. Muslim. 2004. Pemantapan Program dan Strategi Kebijakan Peningkatan Produksi Daging Sapi. Bogor: Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian.